

**KOPI RAKYAT: INVESTASI IBADAH HAJI
MASYARAKAT DESA MULYOREJO KECAMATAN SILO KABUPATEN
JEMBER¹**

**PUBLIC COFFEE: THE INVESTMENT TO GO FOR HAJ OF MULYOREJO PEOPLE
SILO JEMBER REGENCY**

Latifatul Izzah

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Pos-el: latifatul.izzah@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang kondisi masyarakat Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang didiskreditkan oleh pemerintah Kabupaten Jember sebagai desa yang masuk kategori miskin. Dengan pembuktian teori kemiskinan yang digali dari sumber primer dan sumber sekunder didapatkan realita yang berlawanan. Ternyata hampir 70 persen masyarakatnya menginvestasikan uangnya untuk menunaikan ibadah haji. Sumber perekonomian masyarakatnya bersandar pada hasil perkebunan kopi rakyat. Kondisi alam yang sulit dijangkau mengakibatkan masyarakatnya tidak mendapat fasilitas kesehatan dan penerangan listrik dari pemerintah. Namun tidak menjadikan masyarakatnya frustrasi. Kondisi yang serba sulit ini memunculkan ide gila dengan membuat pembangkit listrik tenaga mikro hidro dengan dana swadaya masyarakat. Sebuah investasi dalam jangka panjang yang menghasilkan uang milyaran rupiah.

Kata kunci: kopi rakyat, investasi ibadah haji, masyarakat Desa Mulyorejo

Abstract

This article discusses the condition of the community in Mulyorejo village, Silo subdistrict, Jember regency that is discredited by the government of Jember regency and categorized as a poor village. Through the poverty theory and from primary and secondary sources, this research can prove a contrary reality about the community. Almost 70 percent of the community invests their money for pilgrimage to Mecca. Their economic sources depend on the harvest of the traditional Coffee Plantations owned by the local farmers. The natural condition of the village as a rural area causing the village community do not have a sufficient facility for health and electricity from the government. However, these conditions do not make the villagers frustrated, but encourage them to establish a micro-hydro power plant using self-generated funds. The efforts to get the power plant they have done is a long-term infestation that earns billions of Rupiah.

Keywords: smallholder coffee, haj investment, Mulyorejo district community

¹ Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul "Haji Kopi: Paradoks Masyarakat Miskin Kawasan Perkebunan Kopi Kecamatan Silo Kabupaten Jember" sumber dana BOPTN Tahun 2015.

A. Pendahuluan

Eksotisme Jawa dikenal di dunia Barat, terutama lewat hasil buminya, yakni kopi. Berawal dari kejayaan kopi akibat penerapan sistem tanam paksa (*Cultuurstelsel*) masa Gubernur Jenderal Johannes van Den Bosch berkuasa (1830–1840). Peter Boomgard dalam buku *Anak Jajahan Belanda Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795–1880* mencatat, tanam paksa mewajibkan petani mengalokasikan seperlima lahan untuk tanaman Eropa, yakni kopi, tebu, nila, teh, dan tembakau (tanaman Agroindustri). Para petani Jawa tidak terbiasa menanam tanaman agroindustri tetapi terbiasa menanam padi-padian dan umbi-umbian untuk memenuhi kebutuhan subsistemnya. Raja-raja feodal Jawa sudah terbiasa mendoktrin rakyatnya dalam hikayat-hikayat untuk menanam padi-padian dan umbi-umbian demi kemakmuran, sehingga ketika van Den Bosch memaksa petani untuk menanam tanaman agroindustri membawa dampak bagi banyak petani Jawa. Para petani dipaksa berjalan berkilo-kilo meter dari desa mereka ke tempat perkebunan kopi dan kadang-kadang harus meninggalkan desa selama berbulan-bulan, hidup di tempat penampungan sementara dekat area perkebunan kopi.

Dampak sistem tanam paksa khususnya penanaman kopi dirasakan sampai saat ini oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah masyarakat Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang sebagian besar masyarakatnya bersandar pada perkebunan kopi. Desa Mulyorejo dikategorikan oleh pemerintah Kabupaten Jember sebagai salah satu desa yang masuk dalam standar kemiskinan. Terdiri atas lima dusun, yaitu: Baban Timur, Baban Tengah, Baban Barat, Batu Ampar, dan Silosanen. Pada tahun 2012 sebanyak 13.717 keluarga di Desa Mulyorejo tinggal di tepi dan di dalam hutan. Jalan menuju ke sana tidak beraspal, berbatu, menanjak, dan medannya cukup sulit. Pada musim kemarau, jalan berdebu dan pada musim hujan, jalanan

berlumpur. Warga terpaksa melilitkan rantai ke roda sepeda motor, agar tidak mudah tergelincir. Sebagian besar warga hidup dari budidaya tanaman kopi. Mereka mengubah hutan menjadi kebun kopi. “Ikut fatwa Gus Dur: hutan milik rakyat”. Tahun 1998, saat reformasi bergulir, Indonesia memang berada dalam situasi tanpa tatanan, *chaos*. Warga yang selama puluhan tahun ditekan oleh kekuatan militer, melampiaskan amarah dan rasa takut selama ini dengan menduduki lahan perkebunan dan hutan yang semula dikuasai negara (Izzah, 2015:4).

Pendudukan lahan hutan memunculkan benturan dengan aparat perhutani. Tahun 1970, Perhutani dan masyarakat sekitar hutan pernah bersepakat: warga dipersilakan menanam kopi, namun perhutani mendapat bagian dari hasil penjualan. Kesepakatan itu berakhir, setelah perusahaan perkebunan memprotes Perhutani, yang dianggap melakukan usaha di luar tugas dan fungsi institusi. Selanjutnya, aparat Perhutani mulai membabati kopi milik rakyat. Perlawanan muncul dan warga tidak bisa menerima penjelasan apapun dari Perhutani. Pada Tahun 2012, warga masih mengusahakan kopi di hutan Baban Silosanen. Tanah seluas 1.174 hektare sudah disertifikasi dan menjadi milik warga. Tinggal 6.300 hektare lahan masih belum disertifikasi, namun warga membayar pajak untuk penggunaan.

Rumah warga Desa Mulyorejo terbuat dari bambu. Sebagian ada yang terbuat dari batu bata, namun di bagian lain dinding rumah tetap terbuat dari anyaman bambu. Sebagian besar rumah warga juga tidak teraliri listrik. PLN tidak sanggup membangun instalasi jaringan di Desa Mulyorejo dengan ongkos besar. Pemerintah Kabupaten Jember hanya mampu memberikan bantuan pembangkit listrik tenaga surya untuk kurang lebih 200 rumah. Sekitar 30 persen warga patungan menggunakan generator. Namun, sebagian lainnya menerangi malam dengan lampu teplok. Minyak tanah sulit didapat, sekalipun ada, harganya mencapai Rp 15 ribu

per liter. Mereka akhirnya berinovasi dengan menggunakan aki sebagai penyimpan tenaga listrik. Tentu saja nyala lampu tidak maksimal.

Pada tahun 2012 rata-rata pengeluaran warga perhari untuk membiayai kebutuhan hidup paling banyak sekitar Rp 15 ribu atau kurang. Bank Dunia menyatakan, kelompok kelas menengah mengeluarkan uang per kapita per hari 2–20 dollar Amerika Serikat, atau sekitar Rp 19–180 ribu per hari. Dengan demikian, warga di tepi hutan itu bukan bagian dari kelas menengah versi Bank Dunia. Uang 15 ribu cukup untuk di desa, boleh jadi benar, jika hanya menghitung elemen pangan sebagai kebutuhan hidup. Namun, kehidupan tidak hanya urusan makanan seadanya, tetapi juga kelayakan. Departemen Sosial memberikan batasan garis kemiskinan pada sejumlah rupiah untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo per kalori per orang setiap hari dan kebutuhan di luar pangan seperti rumah, pendidikan, kesehatan, dan pendidikan.

Pencapaian pendidikan membutuhkan biaya besar. Infrastruktur sekolah di Desa Mulyorejo hanya memenuhi kebutuhan pendidikan sembilan tahun. Di sana hanya ada Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dalam satu atap. Warga tidak terlampau peduli dengan pendidikan formal. Secara umum, Kecamatan Silo menempati urutan dua jumlah anak yang tidak bersekolah dari 31 kecamatan. Mereka yang tidak bersekolah termasuk dalam kelompok rumah tangga atau individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 30 persen terendah di Indonesia.

Tabungan ikut menentukan tingkat kesejahteraan, namun mayoritas warga di tepi hutan tidak memiliki akses perbankan. Layaknya masyarakat pedesaan di Jember, khususnya Madura, kelebihan uang diinfestasikan untuk membeli ternak sapi. Sapi ini bisa dirawat orang lain (digaduh), dengan imbalan bagi hasil saat penjualan, atau sang perawat mendapat bagian satu ekor anak sapi jika sapi itu beranak. Saat musim panen kopi tiba, warga mendapat

pemasukan cukup besar, namun prioritas utama bukanlah membeli sapi atau barang-barang kebutuhan lain. M. Ilyas, salah satu warga Mulyorejo mengatakan, mereka lebih suka menggunakan uang penjualan kopi untuk mendaftarkan haji bersama-sama. Sekitar 70 persen warga Dusun Baban Barat sudah berhaji. Kondisi ini berlawanan (paradok) dengan keadaan masyarakatnya yang dikategorikan miskin.

Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang telah lama diperbincangkan karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya penanganannya. Dalam panduan Keluarga Sejahtera, kemiskinan adalah suatu keadaan ketika seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam panduan IDT, kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan: Mengapa Desa Mulyorejo dikategorikan sebagai desa miskin, padahal hampir 70 persen masyarakatnya sudah menunaikan ibadah haji? Permasalahan dijabarkan menjadi beberapa persoalan berikut.

1. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Desa Mulyorejo?
2. Bagaimana status tanah yang ada di Desa Mulyorejo?
3. Mengapa mayoritas masyarakat Desa Mulyorejo menggunakan uangnya untuk menunaikan ibadah haji?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Louis Gootschalk, 1982:18). Tahap pertama, heuristik adalah usaha mencari dan mengumpulkan

sumber yang akan dipakai sebagai data. Data berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh dari pengamatan langsung terhadap suatu peristiwa, maupun hasil wawancara langsung dengan pelaku yang terlibat dalam peristiwa. Data primer diperoleh dari masyarakat dan pemerintah pada level kampung/Desa Mulyorejo Kecamatan Silo hingga Kabupaten Jember. Data primer yang dikumpulkan meliputi indikator-indikator kemiskinan, penyebab kemiskinan, lingkaran kemiskinan, pola konsumsi (makanan dan non-makanan) penduduk miskin, dan munculnya inisiatif untuk beribadah haji. Indikator-indikator kemiskinan untuk memahami kemiskinan dari perspektif orang miskin itu sendiri. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur yang saling terkait dengan wilayah riset. Tahap kedua adalah kritik sumber. Sumber-sumber terlebih dahulu dinilai melalui kritik ekstern dan kritik intern untuk menyeleksi data yang kemudian diklasifikasi berdasarkan kerangka tulisan. Kritik eksternal menilai keakuratan sumber sedangkan kritik intern menilai kredibilitas data dalam sumber (Wasino, 2007:9–10).

Tahap ketiga adalah interpretasi yang dilakukan dengan memaknai fakta dan hubungan antar fakta secara objektif. Kalaupun dalam hal tertentu bersikap subjektif, harus subjektif rasional dan bukan subjektif emosional. Tahap keempat adalah historiografi yang dilakukan dengan merangkai fakta berikut maknanya secara kronologis/diakronis dan sistematis, menjadi tulisan sejarah.

C. Hasil Penelitian

Data yang telah diperoleh melalui studi pustaka dan melalui penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan tahapan yang lazim dilakukan dalam penelitian sejarah. Analisis diarahkan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang sudah dikemukakan di awal tulisan ini. Keseluruhan jawaban

terhadap pertanyaan penelitian tersaji pada uraian berikut.

1. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar wilayah Desa Mulyorejo adalah lahan perkebunan. Mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan pedagang. Secara komprehensif, mata pencaharian penduduk Desa Mulyorejo dapat dilihat pada table berikut.

Mata Pencaharian Penduduk Tahun 2012

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (JIWA)
1	Petani	4.478
2	Industri / Kerajinan	17
3	Konstruksi	-
4	Perdagangan	327
5	Angkutan	59

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Mulyorejo adalah sebagai petani khususnya petani kopi dan bukan sebagai buruh tani kopi. Penghasilan petani kopi lebih besar dibandingkan dengan petani di luar kopi, karena harga kopi mengikuti nilai dolar. Setiap kepala keluarga sebagian besar mempunyai lahan perkebunan dengan luas 1–2 ha. Musim panen datang antara bulan Juni, Juli, Agustus. Jika musim panen tiba, setiap kepala keluarga membutuhkan tiga orang pekerja pemetik kopi dan setiap kepala keluarga menghasilkan kopi sebanyak 1–2 ton. Luas tanah yang telah ditanami kopi oleh masyarakat Desa Mulyorejo mencapai kurang lebih 1712 ha. Setiap keluarga yang mempunyai lahan perkebunan kopi seluas 1ha, permusim menghasilkan kopi 1 ton, harga perkilogram kopi pada Tahun 2012 Rp17.000. Maka rata-rata petani kopi Desa Mulyorejo menghasilkan Rp 17.000.000 sekali panen ($1.000 \times 17.000 = 17.000.000$).

Dari seluruh luas lahan pertanian kopi, hasil panen kopi di Desa Mulyorejo, pertahunnya mencapai kurang lebih 14.552 ton. Seandainya pemerintah memfasilitasi dengan membuat sentral dan pemasaran kopi di Mulyorejo, diindikasikan penghasilan masyarakat akan

bertambah. Penjualan kopi yang belum tertata dan tanpa wadah pemasaran yang mendukung petani, misalnya masyarakat Desa Mulyorejo dalam menjual hasil panennya, langsung dijual kepada para tengkulak yang datang langsung ke Desa Mulyorejo. Tengkulak-tengkulak tersebut dari Kabupaten Jember dan dari Dampit Kabupaten Malang.

2. Perkebunan Kopi di Wilayah Desa Mulyorejo

Secara geografis, Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember terletak pada ketinggian 750 m di atas permukaan laut. Letak tersebut menguntungkan untuk tanaman kopi yang sudah mulai dicoba di Indonesia pada tahun 1696 oleh Walikota Amsterdam *Nicholas Witsen* yang memerintahkan komandan VOC di Pantai Malabar, *Adrian van Ommen* untuk membawa bibit kopi ke Batavia (sekarang Jakarta). Bibit kopi tersebut diujicoba pertama di lahan pribadi Gubernur Jendral VOC *Willem van Outhoorn* di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Pondok Kopi, Jakarta Timur. Panenan pertama kopi Jawa, hasil perkebunan di pondok kopi langsung dikirim ke Hortus Botanicus Amsterdam. Kalangan biolog di Hortus Botanicus Amsterdam kagum akan mutu kopi Jawa. Menurut mereka mutu dan citarasa kopi Jawa itu melampaui kopi yang pernah mereka ketahui. Para ilmuwan segera mengirim contoh kopi Jawa ke berbagai kebun raya di Eropa.

Penanaman kopi berlanjut sampai pada masa sistem *cultuurstelsel*. Dampak dari sistem *Cultuurstelsel* dipandang cukup signifikan. Kerajaan Belanda menjadi kaya raya dari hasil *cultuurstelsel* sampai akhirnya muncul kebijakan politik etis yang dapat mendatangkan para investor untuk bisa menyewa tanah-tanah perkebunan di wilayah Indonesia. J.H van Leneep dan J.H. van der Errelan keluarga besar dari Victor Clemens Boon menyewa tanah perkebunan di Jember pada tahun 1902 dengan mendapatkan hak *erfpacht* di daerah Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang

dikenal dengan perkebunan Curah Wangkal. Luas hak *erfpacht* perkebunan Curah Wangkal adalah 38.200.758 m² (Sesuai daftar SKPT Tahun 1973 yang diajukan oleh Ineke Irawati sebagai keturunan dari Victor Clemens Boon). Dari luas wilayah perkebunan Curah Wangkal yang berada di wilayah Desa Pace yang pada awalnya Desa Mulyorejo merupakan bagian dari Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Di wilayah tersebut dapat diasumsikan bahwa pada mulanya yang ditanam adalah kopi (melihat realita tanaman yang ada di Desa Mulyorejo adalah Kopi) dan tanaman jati. Tanaman jati ingin dikuasai kembali oleh Ineke Irawati sebagai ahli waris keluarga Victor Clemens Boon, sedangkan tanah-tanah yang masih ditanami kopi terus dirawat oleh masyarakat Desa Mulyorejo atas izin dari Ineke Irawati. Tanah seluas 1174 hektar sudah disertifikasi dan menjadi milik warga Desa Mulyorejo, sedangkan 6300 hektar lahan belum disertifikasi, namun warga membayar pajak untuk penggunaannya.

Atas dasar kepemilikan tanah yang ada di wilayah Desa Mulyorejo, mayoritas masyarakatnya hidup dari hasil perkebunan kopi khususnya kopi robusta, pisang, dan tanaman palawija lainnya. Akses jalan menuju ke Desa Mulyorejo sulit untuk dilalui. Hal itu berpengaruh besar terhadap pemasaran hasil perkebunan, khususnya kopi. Biasanya para tengkulak dari Desa Pace yang datang ke wilayah Desa Mulyorejo untuk membeli hasil perkebunan kopi baik dalam bentuk gelondongan (kopi yang masih ada kulitnya atau dikenal dengan kopi basah) maupun yang sudah dikeringkan. Hasil penjualan tentu lebih murah. Sementara itu untuk menjual sendiri ke kota (Jember) memerlukan biaya tinggi. Namun harga kopi masih lebih bagus dibanding dengan hasil tanaman lainnya. Oleh karena itu masyarakat Dusun Baban Barat yang mayoritas masyarakatnya menanam kopi dapat menginvestasikan uangnya untuk ibadah haji. Tercatat pada Tahun 2012 hampir 70 persen warganya sudah menunaikan ibadah haji.

Dari hasil penelitian di lapangan, ternyata masyarakat tidak tertarik untuk membangun rumah seperti yang ada di kota karena *cost*-nya tinggi. Truk pengangkut bahan bangunan menjual dengan harga tinggi karena sulitnya medan yang dilalui. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan tidak dapat dinilai dari kondisi fisik rumah-rumah yang ada di Desa Mulyorejo yang mayoritas terbuat dari bambu dan hanya sebagian kecil berbahan batu bata. Masyarakat lebih memilih untuk menginvestasikan uangnya untuk kepentingan ibadah haji.

3. Kuatnya Budaya Madura di Desa Mulyorejo

Masyarakat Madura dikenal memiliki budaya yang khas, unik, stereotipikal, dan stigmatik. Penggunaan istilah *khas* menunjuk pada pengertian bahwa entitas etnik Madura memiliki kekhususan-kultural yang tidak serupa dengan etnografi komunitas etnik lain. Kekhususan kultural itu tampak antara lain pada ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan mereka secara hierarkis kepada empat figur utama dalam berkehidupan, yaitu: *Buppa*, *Babbu*, *Guru*, dan *Rato* (Ayah, Ibu, Guru, dan Pemimpin pemerintahan). Kepada figur-figur utama itulah kepatuhan hierarkis orang-orang Madura menampakkan wujudnya dalam kehidupan sosial budaya mereka (Wiyata, 2003:1).

Bagi entitas etnik Madura, kepatuhan hierarkis tersebut menjadi keniscayaan untuk diaktualisasikan dalam praksis keseharian sebagai "aturan normatif" yang mengikat. Oleh karenanya, pengabaian atau pelanggaran yang dilakukan secara sengaja atas aturan itu menyebabkan pelakunya dikenai sanksi sosial maupun kultural. Pemaknaan etnografis demikian berwujud lebih lanjut pada ketiadaan kesempatan dan ruang yang cukup untuk mengenyampingkan aturan normatif itu. Dalam skala yang lebih luas dapat dinyatakan bahwa aktualisasi kepatuhan itu dilakukan sepanjang hidup. Tidak ada kosakata yang tepat untuk

menyebut istilah lainnya kecuali ketundukan, ketaatan, dan kepasrahan kepada keempat figur tersebut.

Kepatuhan atau ketaatan kepada Ayah dan Ibu (*buppa'* dan *babbu'*) sebagai orang tua kandung atau *nasabiyah* sudah jelas, tegas, dan diakui keniscayaannya. Secara kultural ketaatan dan ketundukan seseorang kepada kedua orang tuanya adalah mutlak. Jika tidak, ucapan atau sebutan kedurhakaan ditimpakan kepadanya oleh lingkungan sosiokultural masyarakatnya. Dalam konteks budaya manapun kepatuhan anak kepada kedua orang tuanya adalah mutlak, tidak dapat dinegosiasikan, maupun diganggu gugat. Yang mungkin berbeda, hanyalah cara dan bentuk dalam memanifestasikannya. Kepatuhan mutlak itu tidak terkendala oleh apa pun, sebagai kelaziman yang ditopang oleh faktor genealogis. Konsekuensi lanjutannya relatif dapat dipastikan bahwa jika pada saat ini anak patuh kepada orangtuanya, pada saatnya nanti dia ketika menjadi orang tua akan ditaati pula oleh anak-anaknya. Itulah salah satu bentuk pewarisan nilai kultural yang terdiseminasi. Siklus secara kontinyu dan sinambung itu terus berulang dan berkelanjutan dalam kondisi normal, wajar, dan alamiah, kecuali kalau pewarisan nilai-nilai kepatuhan itu mengalami keterputusan yang disebabkan oleh berbagai kondisi, faktor, atau peristiwa luar biasa (Taufiqurrahman, 2006:3).

Kepatuhan orang-orang Madura kepada figur guru berlangsung pada level-hierarkis selanjutnya. Penggunaan dan penyebutan guru menunjuk dan menekankan pada pengertian kiai-pengasuh pondok pesantren atau sekurang-kurangnya ustadz pada "sekolah-sekolah" keagamaan. Peran dan fungsi guru lebih ditekankan pada konteks moralitas yang dipertalikan dengan kehidupan eskatologis untuk mendapatkan ketenteraman dan keselamatan diri dari beban atau derita di alam kehidupan akhirat (*morality and sacred world*). Oleh karena itu, ketaatan orang-orang Madura kepada figur guru menjadi penanda khas budaya

mereka yang mungkin tidak perlu diragukan lagi keabsahannya.

Siklus-generatif tentang kepatuhan orang Madura (sebagai murid) kepada figur guru tidak dengan sendirinya terwujud sebagaimana ketaatan anak kepada figur I dan II, ayah dan ibu. Kondisi itu dikarenakan tidak semua orang Madura mempunyai kesempatan untuk menjadi figur guru. Kendati terdapat anggapan-prediktif bahwa figur guru sangat mungkin diraih oleh murid karena aspek genealogis, namun dalam realitasnya tidak dapat dipastikan bahwa setiap murid akan menjadi guru, mengikuti jejak orang tuanya. Oleh karenanya, makna kultural yang dapat ditangkap adalah bahwa bagi orang Madura belum cukup tersedia ruang dan kesempatan yang leluasa untuk mengubah status menjadi orang yang senantiasa harus berperilaku patuh, tunduk, dan pasrah (Taufiqurrahman, 2006:4).

Kepatuhan orang Madura kepada figur *Rato* (pemimpin pemerintahan) menempati posisi hierarkis keempat. Figur *Rato* dicapai oleh seseorang dari manapun etnik asalnya bukan karena faktor genealogis melainkan karena keberhasilan prestasi dalam meraih status. Dalam realitasnya, tidak semua orang Madura diperkirakan mampu atau berkesempatan untuk mencapai posisi sebagai *Rato*, kecuali 3 atau 4 orang (sebagai Bupati di Madura) dalam 5 hingga 10 tahun sekali. Itupun baru terlaksana ketika diterbitkan kebijakan nasional berupa Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, tahun 1999 yang baru.

Oleh karena itu, kesempatan untuk menempati figur *Rato* dalam realitas praksisnya merupakan kondisi langka yang relatif sulit diraih oleh orang Madura. Dalam konteks itulah dapat dinyatakan bahwa sepanjang hidup orang-orang Madura masih tetap dalam posisi yang senantiasa harus patuh. Begitulah posisi subordinatif-hegemonik yang menimpa para individu dalam entitas etnik Madura.

Deskripsi tentang kepatuhan orang-orang Madura kepada empat figur utama tersebut

sesungguhnya dapat dirunut standar referensinya pada sisi religiusitas budayanya. Sebagai pulau yang berpenghuni mayoritas (\pm 97–99%) muslim, Madura menampakkan ciri khas ke-Islam-an, khususnya dalam aktualisasi ketaatan kepada ajaran normatif agamanya (Wiyata, 2002:42). Kepatuhan kepada kedua orang tua merupakan tuntunan Rasulullah SAW walaupun urutan hierarkisnya mendahulukan ibu (*babbu'*) kemudian ayah (*Buppa'*). Rasulullah menyebut ketaatan anak kepada ibunya berlipat 3 dari pada ayahnya. Selain itu juga dinyatakan bahwa keridhaan orang tua “menjadi dasar” keridhaan Tuhan. Oleh karena itu, secara normatif-religius, derajat ibu 3 kali lebih tinggi daripada ayah. Maka, produk ketaatan orang Madura kepada ajaran normatif Islam melahirkan budaya yang memosisikan ibu pada hierarki tertinggi. Dalam kenyataannya, tidak demikian. Kendati pun begitu, secara kultural dapat dimengerti mengapa hierarki ayah diposisikan lebih tinggi dari ibu. Posisi ayah dalam sosiokultural masyarakat etnik Madura memegang kendali dan wewenang penuh dalam lembaga keluarga sebagai sosok yang diberi amanah untuk bertanggung jawab dalam semua kebutuhan rumah tangga, di antaranya: pemenuhan keperluan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan seluruh anggota keluarga, termasuk di dalamnya sang ibu sebagai anggota dalam “kepemimpinan” lelaki.

Di sisi lain, kepatuhan kultural orang Madura kepada Guru (*kiai/ustadz*) maupun kepada pemimpin pemerintahan karena peran dan jasa mereka itu dipandang bermanfaat dan bermakna bagi survivalitas entitas etnik Madura. Guru berjasa dalam mencerahkan pola pikir dan perilaku komunal murid untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan mendiami negeri akhirat kelak. Kontribusi mereka dipandang sangat bermakna dan besar karena telah memberi bekal untuk survivalitas hidup di alam dunia dan keselamatan pascakehidupan dunia. Pemimpin pemerintahan berjasa dalam mengatur ketertiban

kehidupan publik melalui penyediaan iklim dan kesempatan bekerja, mengembangkan kesempatan bidang ekonomi, mengakomodasi kebebasan beribadat, memelihara suasana aman, dan membangun kebersamaan atau keberdayaan secara partisipatif. Dalam dimensi religiusitas, sebutan figur *Rato* dalam perspektif etnik Madura dipersamakan dengan istilah *ulil amri* yang sama-sama wajib untuk dipatuhi.

4. Ekologi Tegal

Menurut Kuntowijoyo, ekologi tegalan di wilayah Madura merupakan faktor penting dalam membentuk karakter masyarakat Madura. Dominasi tegalan telah ikut menentukan pola permukiman penduduk dalam satuan *taneyan lanjhang* dan *kampong mejhi* yang pada gilirannya mengakibatkan terjadinya ikatan kekeluargaan yang kuat. Kenyataan ini menyebabkan hubungan sosial orang Madura berpusat pada individu dengan keluarga inti sebagai satuan dasar solidaritas. Kelangkaan ekologi oleh dominan tegalan menyebabkan lingkungan tidak mampu mendukung satuan keluarga yang lebih besar lagi. Kenyataan ini telah ikut menentukan pola kehidupan sosial orang Madura dalam menciptakan individu yang percaya pada dirinya dibandingkan dengan individu yang bersifat komunal dan kooperatif (2002:577).

Tidak adanya surplus ekonomi sebagai akibat dari pengaruh ekologi tegalan yang miskin telah mengurangi kejahatan yang terorganisasi secara komunal seperti perampokan besar-besaran. Oleh karena itu, kekerasan carok yang menjadi ciri orang Madura umumnya sangat bersifat individual (Kuntowidjoyo, 2002:577). Sebagian besar orang Madura tidak tamat sekolah atau bahkan tidak pernah sekolah. Mereka pekerja keras, ulet, tidak pernah putus asa, pantang menyerah, penuh percaya diri, dan memiliki jiwa kewirausahaan. Mereka bertabiat keras, berani, dan gigih dalam perjuangan hidupnya, rajin menabung yang umumnya untuk ibadah haji.

Menabung memang merupakan kebiasaan orang Madura, dalam bentuk uang, perhiasan,

atau hewan ternak. Tabungan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai penyediaan payung sebelum hujan, sebab juga dimaksudkan untuk bekal dalam menunaikan ibadah haji. Dorongan naik haji ini semakin kuat karena masyarakat Madura memang memberikan penghargaan status sosial yang lebih tinggi pada warga yang menunjukkan keberhasilan yang diberkahi Tuhan tersebut. Dorongan naik haji tidak terlepas dari peran para kiai yang menjadi tokoh berpengaruh. Oleh Kuntowijoyo, kiai Madura disebut dengan elit desa. Pengetahuan yang mendalam tentang Islam menjadikan mereka paling terdidik di desa. Beberapa kiai selain tetap menyampaikan keahliannya dalam soal-soal agama, juga dapat meramalkan nasib, menyembuhkan orang sakit, dan mengajar olah kanuragan.

Kepatuhan pada empat figur (*Buppa,' Babbu, Guru, dan Rato* atau Pemimpin pemerintahan) selalu melekat pada semua orang Madura di mana pun mereka berada. Di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang hampir 90% mayoritas penduduknya adalah suku Madura, yang kemudian diikuti oleh beberapa suku Jawa, Sunda, Bugis, dan Bali. Budaya Madura mendominasi, khususnya pengaruh kiai yang dipatuhi oleh masyarakat Madura. Para kiai mampu sebagai magnet untuk mengajak masyarakat menginvestasikan uangnya untuk beribadah haji. Menurut Kuntowijoyo, kuatnya pengaruh kiai di tengah masyarakat Madura karena faktor ekologi dan sistem sosial. Ekologi tegalan hingga sekarang masih dominan. Apa yang dikenal dengan "Revolusi Hijau" di bidang pertanian tidak mampu mengubah sistem sosial, politik, dan kultural Madura. Ekosistem tegal sudah menjadi satu dengan masyarakat Madura, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruhnya pada organisasi sosial dan sistem simbol masyarakat. Replika ekologi tegal yang ada di Madura juga hampir sama dengan topografi Desa Mulyorejo yang terdiri atas perkebunan seluas 2.633,80 ha, dan luas tegalan mencapai 1.874,50 ha.

Kuatnya budaya Madura termanifestasi dalam kehidupan masyarakat Desa Mulyorejo. Masyarakat tidak memikirkan kehidupan dunia-wi seperti masyarakat di kota. Masyarakatnya hidup sederhana dengan rumah sebagian tembok sebagian bambu, tetapi mereka *tawaddu'* terhadap para kiai. Pengaruh para kiai sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Madura, yang mampu mendorong masyarakat Desa Mulyorejo untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk ibadah haji.

5. Status Tanah Sebagai Sumber Kehidupan Masyarakat Desa Mulyorejo

Semula sebelum peneliti terjun ke lapangan, ada beberapa referensi yang menyebutkan bahwa tanah yang ada di Desa Mulyorejo adalah pemberian dari Perhutani pada masyarakat. Perhutani dan masyarakat sekitar hutan pernah bersepakat: warga dipersilakan menanam kopi, namun Perhutani mendapat bagian dari hasil penjualan. Kesepakatan itu tidak berlaku lagi setelah perusahaan perkebunan memprotes Perhutani, yang dianggap melakukan usaha di luar tugas dan fungsi institusi. Selanjutnya, aparat Perhutani mulai membabat kopi milik rakyat. Perlawanan meletus. Warga tidak bisa menerima penjelasan apapun dari Perhutani. Warga masih mengusahakan kopi di hutan dan tepian hutan Baban Silosanen. Tanah seluas 1.174 hektare sudah disertifikasi dan menjadi milik warga. Tinggal 6.300 hektare lahan masih belum disertifikasi, namun warga membayar pajak untuk penggunaannya.

Dari hasil penelitian di lapangan didapat informasi bahwa tanah yang ada di Desa Mulyorejo seluas 1.174 hektare memang sudah dimiliki oleh masyarakat desa tersebut. Di sisi lain, tanah yang ada di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dengan batas sebelah barat Dusun Baban Barat berbatasan dengan sungai Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember seluas 63 hektar adalah milik seorang ahli waris keturunan Jerman dan Madura bernama Ineke Irawati. Ia menyatakan

bahwa tanah di Desa Mulyorejo adalah bagian dari kepemilikan orang tuanya, seorang partikelir yang menyewa tanah di dataran tinggi Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dengan memperoleh hak *erfpacht*. Ayah Ineke Irawati bernama Victor Clemens Boon lahir di Padang tanggal 18 Februari 1881 dan meninggal dunia ketika berumur 82 tahun di Temas Batu Malang, 14 Agustus 1963. Sesuai dengan kutipan akta kematian nomor 2/1963 tanggal 6 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Malang, Victor Clemens Boon adalah warga Negara Jerman (Kutipan akta kematian, Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang no. 2632-2003).

Berdasarkan surat keterangan dari balai harta peninggalan Malang tanggal 5 Agustus 1973 bahwa ayah kandung Victor Clemens Boon adalah Boon Clemens Jacobus mempunyai hubungan keluarga dengan JH Van Leneep yang mempunyai usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Jember, yaitu di Daerah Pace Kecamatan Silo seluas 4000 Ha pada tahun 1918. Ibu kandung Victor Clemens Boon bernama Miniekhudsen Hermina Johanna Hendrita mempunyai hubungan keluarga dengan JH Vander Errelan dan mempunyai usaha perkebunan di Kabupaten Jember.

Victor Clemens Boon menikah dengan Kartini kemudian melahirkan anak pertama yang bernama Ineke Irawati lahir pada tanggal 16 Agustus 1953 di Kabupaten Situbondo, berdasarkan penetapan pengadilan negeri Situbondo tanggal 26 Maret 1991 nomor 22/Pdt.P/1991/PN.STB. (Kutipan akta kelahiran no 29/PK/2005, Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo).

Status tanah dengan hak *erfpacht*, namun ahli waris dapat mengupayakan hak kepemilikan sampai pengadilan. Tampaknya ada konspirasi politik untuk saling menguntungkan antara pihak Ineke Irawati sebagai ahli waris dari Victor Clemens Boon dengan masyarakat Desa Mulyorejo yang menginginkan tetap mengelola

tanah tersebut. Sementara itu, pihak perhutani dan PTPN XII saling mengklaim bahwa tanah yang ada di Desa Mulyorejo adalah milik mereka. Untuk memperkuat status kepemilikan tanah tersebut, Ineke sebagai ahli waris memperjuangkan sampai tingkat pengadilan. Terbukti dengan adanya surat pendaftaran tanah di tingkat kabupaten.

6. Investasi dalam Bentuk Ibadah Haji

Penilaian Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Desa Mulyorejo yang dimasukkan dalam standar desa miskin ternyata tidak tepat. Kemungkinan petugas yang mendata tidak terjun ke wilayah Desa Mulyorejo karena sulitnya medan. Fakta yang ada di Desa Mulyorejo menunjukkan bahwa masyarakat bermata pencaharian sebagai petani kopi, bukan buruh tani kopi. Harga jual kopi mengikuti dolar. Biasanya petani kopi menjual hasil panen dengan sistem ijon. Pengijon datang ke Desa Pace untuk menjual kembali kopi yang sudah dibeli dari para petani dengan harga yang berlipat. Hasil penjualan kopi biasanya diinvestasikan oleh sebagian masyarakat Desa Mulyorejo khususnya Dusun Baban Barat untuk menunaikan ibadah haji.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakatnya mampu secara ekonomis dan tidak masuk kategori desa miskin. Sebagai ilustrasi, sekitar 70% masyarakat Desa Mulyorejo berinvestasi untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah haji dilakukan dengan berbagai cara agar ongkos haji bisa tercukupi, seperti menunggu hasil panen kopi dan arisan haji melalui wadah pengajian atau istighosah perbulan atau sekali panen. Kegiatan ini dipimpin oleh Kh. Asbullah, nama perkumpulannya *jama'ah ya hayyuya qoyyum*.

Cara lainnya adalah gotong royong sesama keluarga untuk membantu dalam mencukupi biaya haji, yang nantinya akan diganti pada saat panen kopi. Beberapa nama berikut sudah menunaikan ibadah haji adalah H. Khairul, H. Khusain, H. Musleh, dan H. Yusuf. H. Bukhori

umur 45 tahun, sudah menunaikan haji dua kali. Dana haji, sebagian besar dari hasil kopi yang mereka tabung. Sanak keluarga juga membantu biaya haji dengan cara yang mereka sebut "gotong royong" sesama keluarga.

Masyarakat santri Mulyorejo memiliki motivasi kuat untuk menunaikan ibadah haji karena didukung oleh faktor ekonomi yang cukup mapan dari hasil tanaman kopi, kolektivitas keluarga dan masyarakat yang kuat untuk mendukung anggota keluarga/masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji, peran kiai yang selalu mendorong jemaahnya untuk segera menunaikan haji, dan dorongan dari sanak saudara yang telah menunaikan ibadah haji seperti yang dilakukan oleh H. Rasyid, H. Mansyur, dan H. Imam.

Di Baban Tengah yang menunaikan ibadah haji murni dari hasil perkebunan kopi, yaitu: H. Fauzi, H. Anisa, H. Abdul Rosyid, H. Siddiq, Hj. Siti Maryam, dan Hj. Raodah. H. Ariefurrohman yang dikenal (H. Arip) dan Hj. Siti Suhriyeh memiliki kisah yang lain. Keduanya berkeinginan besar menunaikan ibadah haji meskipun dari kalangan masyarakat biasa dan ekonomi pas-pasan. Sebelum menunaikan ibadah haji pekerjaan H. Arip sehari-hari sebagai petani, namun luas tanah yang dimiliki tidak terlalu luas hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain sebagai petani H. Arip menekuni pekerjaan sampingan sebagai perajin *kereh* atau tirai dari bambu. Paska haji, H. Arip dikenal dengan sebutan "Haji *kereh*".

Jika dilihat dari segi pekerjaan dan keadaan rumah yang terbuat dari bambu (*gheddeg*), berangkat haji merupakan hal yang istimewa. Prioritas menunaikan haji berkaitan dengan kepatuhan masyarakat kepada guru (kiai) yang merupakan salah satu keutamaan yang mereka junjung tinggi. Mereka juga berpandangan bahwa rumah dan harta tidak akan dibawa mati, akan tetapi menunaikan haji menjadi bekal di akhirat dan menyempurnakan rukun Islam.

Oleh karena itu, keadaan ekonomi yang pas-pasan dan fasilitas hidup yang sederhana,

tidak menyurutkan H. Arip untuk menunaikan ibadah haji. H. Arip mengatakan, “*Engak Se E-Kapatiah Mun Tak Ongge Haji.*” ‘seperti mau mati kalo tidak naik haji’. Berbekal niat yang kokoh, berbagai macam cara dilakukan oleh H. Arip berhasil menunaikan ibadah haji. Selain mengumpulkan uang dari hasil pembuatan kereh dan sebagian hasil kopi, H. Arip rela menjual sapi dan tanahnya agar bisa menunaikan ibadah haji. Ilustrasi tersebut membuktikan bahwa apapun akan ditempuh oleh orang Madura untuk melaksanakan nasihat dan ajaran guru (kiai) yang motivasi untuk menunaikan ibadah haji.

D. Simpulan

Uraian pada bagian pembahasan menunjukkan hal-hal berikut. Pertama, Pemerintah Kabupaten tidak boleh gegabah untuk menilai suatu wilayah. Penilaian harus didasarkan pada data di lapangan, sehingga bisa dipetakan wilayah-wilayah mana saja sebetulnya yang harus ditingkatkan perekonomiannya untuk menuju sebuah kabupaten yang maju.

Kedua, perlu ada perbedaan antara petani kopi dengan buruh tani kopi dari sisi pendapatannya. Petani kopi tingkat perekonomiannya tinggi karena mempunyai lahan untuk dikelola, sedangkan buruh tani tingkat perekonomiannya tidak menentu tergantung dari para petani yang menyewa tenaganya. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Mulyorejo adalah petani kopi.

Ketiga, Desa Mulyorejo dikategorikan desa miskin bukan karena faktor ketidakmampuan ekonominya melainkan karena letak wilayahnya yang terisolir. Keempat, investasi masyarakat Desa Mulyorejo dalam bentuk ibadah haji sebagai representasi dari kuatnya budaya Madura.

Daftar Pustaka

- Alcock, P. 1997. *Understanding Poverty*. London: Macmillan Press.
- Berkas. (tt). Berkas Tanah Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, Milik keluarga Victor Clemens Boon.
- Biro Pusat Statistik. 2006. Berita resmi statistik. tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2005– 2006.No.47/IX 1 September 2006.
- Biro Pusat Statistik. 2007. Berita resmi statistik tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2007. No.38/07/Th.X 2 Juli 2007.
- Booth, Anne. 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Gootschalk, Louis. 1982. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hartati, Sri. 2009. “Pengaruh Komunikasi Antarbudaya dan Harmonisasi Kerja di PT Sumber Tani Agung Medan (Studi Korelasional Pengaruh Komunikasi Antarbudaya terhadap Harmonisasi Kerja di PT Sumber Tani Agung Medan).” Skripsi. Medan: Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Komunikasi Ekstension Universitas Sumatera Utara.
- <http://www.bps.co.id>. Diunduh 18 Oktober 2012.
- <http://www.bps.co.id>. Diunduh 29 Oktober 2012.
- Izzah, Latifatul. 2015. *Haji Kopi: Paradoks Masyarakat Miskin Kawasan Perkebunan Kopi Kecamatan Silo Kabupaten Jember*. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher.
- Kuntowidjojo. 2002. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850–1940*.

- Lontar Madura. 2012. "Perilaku Komunikasi Antar Budaya Suku Madura."
- Sayogyo. 1978. "Lapisan Masyarakat yang Paling Lemah di Pedesaan Jawa." *Prisma* No.3, LP3ES, 3-14.
- Soerjani, M. 2005. "Krisis Kearifan Kita." *Kompas*, Kamis 20 Oktober 2005.
- Suhardianto, H. 1999. "Jawa Barat: Desa Adat." Dalam Mubyarto (Editor). *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Laporan Kaji Tindak Program IDT*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.
- Suyanto, S., dan Noviana Khususiyah. 2011. "Imbalan Jasa Lingkungan untuk Pengentasan Kemiskinan." Dalam Jurnal *World Agroforest Development Bank*. van Oostenbrugge, J. A. E, van Densen, W. L
- Taufiqurrohman. 2006. Makalah pada Forum *Annual Conference on Contemporary Islamic Studies*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, di Grand Hotel Lembang Bandung, 26-30 November 2006.
- Wasino. 2007. *Dari Riset hingga Tulisan Sejarah*. Semarang: Unnes Press.
- Wiyata, A. Latief. 2002. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS.
- Wiyata, A. Latief. 2003. *Madura yang Patuh? Kajian Antropologi Mengenai Budaya Madura*. Jakarta: CERIC-FISIP UI.